

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Kiraman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, melalui empat (4) kriteria menurut William Dunn maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Efektivitas pada Kampung Keluarga Berencana terdiri dari empat (4) indikator program. Indikator yang paling efektif yaitu pada peningkatan peserta KB dan untuk indikator yang lain masih belum efektif dalam mencapai tujuan Kampung Keluarga Berencana di Desa Kiraman.
- b. Efisiensi sumberdaya pada pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana yang terdiri dari dua (2) indikator yaitu: sumber daya manusia (staf), dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana di Desa Kiraman masih belum berjalan, karena minimnya fasilitas dan kurangnya tenaga profesional sehingga dapat dikatakan bahwa belum efisien.
- c. Kecukupan dalam kebijakan Kampung Keluarga Berencana pada indikator kualitas pelayanan di Desa Kiraman masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat merasa kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas belum optimal. Begitu pula pada indikator pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dinilai belum berhasil, hal tersebut ditunjukkan dengan tidak berjalannya kelompok UPPKS sehingga masyarakat tidak memiliki pekerjaan sampingan untuk meningkatkan pendapatan.
- d. Responsivitas masyarakat terhadap keberadaan Kampung Keluarga Berencana di Desa Kiraman sudah cukup baik namun tidak dapat dikatakan berhasil karena masyarakat belum merasakan dampak positif serta

perubahan yang signifikan terutama bagi kondisi ekonomimasyarakat. Kebijakan Kampung Keluarga Berencana juga dinilai belum mampu dalam memecahkan permasalahan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Kiraman.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat Peneliti berikan dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Kiraman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan Kampung Keluarga Berencana di Desa Kiraman sebaiknya pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Alor, dapat meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan Kampung Keluarga Berencana di Desa Kiraman guna untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program-program sehingga pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat Kampung Keluarga Berencana terutama dalam bidang pendidikan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keahlian yang diharapkan dapat membangun kualitas SDM masyarakat agar mempunyai daya saing dalam meningkatkan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup masyarakat.
3. Perlunya penambahan tenaga profesional serta fasilitas pendukung seperti perbaikan jalan serta penyediaan alat-alat kesehatan, sehingga dapat mempercepat dan memperlancar pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.
4. Petugas PLKB harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat dan lebih responsif dalam menanggapi aspirasi-aspirasi dari masyarakat Kampung Keluarga Berencana, sehingga aspirasi masyarakat

tidak hanya ditampung namun juga dapat di realisasikan.

5. Sebaiknya kegiatan seperti UPPKS dapat dijalankan dengan melihat potensi sumber daya alam yang memadai dikarenakan pemberdayaan masyarakat kampung Keluarga Berencana sangat diperlukan untuk meningkatkan keahlian khusus bagi masyarakat agar dapat memiliki penghasilan sampingan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat kampung Keluarga Berencana di Desa Kiraman.
6. Diharapkan adanya peningkatan Tenaga Kesehatan serta peran aktif pengurus KB di desa sehingga dalam pelaksanaan programnya bisa dijalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Mada University Press.
- Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Ombak.
- Suharto, E. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Susanti, Eus. 2018. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kuningan
- Wahab, A. S. 2014. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan ModelModel Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Wulandari, Novi. 2018. Evaluasi Implementasi Kampung Keluarga Berencana

DOKUMEN

- Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga

SUMBER LAIN

1. Esteberg (Sugiyono, 2012:317)
<https://www.neliti.com/publications/214522/kompetensi-siswa-dalam-membuat-jurnal-umum-dan-memposting-buku-besar-di-sma-nege>
2. <https://www.bps.go.id/publication/2015/08/12/5933145e1d037f5148a67bac/statistik-indonesia-2015>
3. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all>
4. <http://kampunskb.bkkbn.go.id/about>
5. Menurut lofland dalam Moleong 2014)
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/2539>